



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Mei 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD GUNTUR HAMZAH**
2. Jabatan : **SEKRETARIS JENDERAL**
3. NHK : **156383**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.978.352.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/120 m2 di KOTA MAKASSAR
, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/148 m2 di KOTA MAKASSAR
, HASIL SENDIRI Rp. 1.693.352.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 458.500.001**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 1
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOTOR, PIAGGIO LX 150 SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 30.000.000
4. MOTOR, SUZUKI EN 125 A Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
28.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 113.450.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 2.369.937.600****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----****Sub Total** **Rp. 4.920.239.601****III. HUTANG** **Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 4.920.239.601**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **29 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.